

IMPLEMENTASI PELAYANAN KEMANUSIAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN CEMPAKA PUTIH KECAMATAN CIPUTAT TIMUR

Agiva Ratonadhani¹, Faizal Firdaus², Lisa Fajri Isnaini³

^{1,2,3}) Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta

*agiva.ratu21@mhs.uinjkt.ac.id

Abstrak

Upaya untuk percepatan pengentasan kemiskinan harus selaras dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Pemerintah perlu mempertimbangkan permasalahan kemiskinan sebagai bagian integral dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari isu pemenuhan kebutuhan subsistence, sehingga tingkat kesejahteraan umum dapat diukur dari kemampuan suatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), PKH menawarkan program Family Development Sessions yang mencakup modul parenting, manajemen keuangan, nutrisi dan kesehatan, serta modul khusus untuk ibu hamil, anak, lansia, dan disabilitas. Teori yang menjadi dasar penelitian ini adalah teori modal sosial, dengan fokus pada solidaritas atau hubungan kekeluargaan antar KPM lainnya. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dan kualitatif, dengan menerapkan teknik rinci dalam pengumpulan dan dokumentasi data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak positif dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan akses keluarga terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. PKH memberikan dukungan finansial kepada KPM untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti biaya pendidikan, layanan kesehatan, dan gizi. Program ini juga mendorong keterlibatan keluarga dalam kegiatan pendidikan dan kesehatan, termasuk imunisasi anak, kunjungan ke posyandu, dan asupan makanan sehat.

Kata Kunci: Modal Sosial, Kemiskinan, Program Keluarga Harapan

PENDAHULUAN

Berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Pengentasan Kemiskinan, pemerintah telah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan memberikan kesempatan bekerja mandiri. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat krusial dalam menerapkan kebijakan guna mengatasi permasalahan

kemiskinan saat ini. Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak, diberikan akses ke fasilitas kesehatan (fasku) dan fasilitas pendidikan (fasdik) di lingkungan masyarakat.

Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) akan diperluas untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia, sambil tetap menjaga tingkat bantuan sosial yang diberikan. Melalui PKH, pemerintah didorong untuk mengakses dan memanfaatkan layanan sosial penting seperti kesehatan, pendidikan, pangan, gizi, perawatan, dan dukungan. Ini melibatkan berbagai program pelengkap lain yang sedang berlangsung, termasuk akses terhadap program perlindungan sosial. PKH memiliki tujuan untuk menjadi pusat unggulan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yang secara sinergis menggabungkan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial di tanah air. Salah satu tujuan khusus jangka panjang PKH adalah untuk memutus siklus kemiskinan antargenerasi.

Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan menerapkan berbagai program yang menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan, dengan tujuan mengatasi masalah ini dan memberikan dukungan kepada masyarakat lokal. Di Kelurahan Cempaka Putih, implementasi program-program tersebut mencakup inisiatif untuk membangun dan memperluas infrastruktur dasar, meningkatkan pelayanan dalam sektor pendidikan dan kesehatan, serta mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Dalam pengamatan lapangan, ditemui beberapa masalah umum yang terkait dengan upaya mengentaskan kemiskinan. Salah satu di antaranya terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH), yang mencakup kekurangan pendamping sosial dan pelaksanaan yang tidak optimal. Jumlah pendamping yang terbatas, yaitu satu orang untuk 55 RT dan 11 RW di wilayah penerima Program Keluarga Harapan, mengakibatkan pelaksanaannya belum mencapai tingkat maksimal. Jumlah Kartu Keluarga yang tercatat adalah sebanyak 186.

Banyak dari program-program yang ada, termasuk program pengentasan kemiskinan, tidak memberikan jaminan terhadap peningkatan yang berkelanjutan dalam upaya produktif bagi masyarakat miskin. Program pemerintah juga seringkali tidak dapat diimplementasikan dan dijalankan secara harmonis dengan masyarakat lokal, yang pada akhirnya membuatnya cenderung kurang efektif.

Ego sektoral muncul dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan karena alokasi anggaran cenderung terfokus pada proyek-proyek yang berorientasi program, tanpa memiliki dasar yang jelas terkait hasil program, dan lebih memilih mengutamakan proyek daripada investasi jangka panjang. Program-program nasional seringkali tidak berjalan secara optimal karena kurangnya manajemen yang efektif. Disfungsi sosial dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan disebabkan oleh kurangnya dorongan terhadap aspek kemandirian dan ketidaklembagaan yang terintegrasi di kalangan masyarakat miskin.

Program pemberdayaan untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia terus mengalami peningkatan melalui berbagai inisiatif guna meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Adanya tingginya jumlah penduduk miskin mencapai 28,01 juta jiwa (10,86 persen) pada tahun 2016 menandakan perlunya program yang efektif dan adil untuk memerangi kemiskinan tanpa adanya diskriminasi.

Saat ini, upaya pemberdayaan di Indonesia masih lebih didominasi oleh program bantuan yang tetap menjadi fokus utama pemerintah, namun belum sepenuhnya mampu mengangkat masyarakat dari lingkaran kemiskinan. Program-program yang diterapkan perlu menonjolkan karakter pemberdayaan guna membentuk masyarakat yang cerdas dan mampu mengatasi permasalahan mereka sendiri, terutama yang terkait dengan kemiskinan.

Sejumlah program pemerintah, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), masih menjadi sorotan dan dianggap kontroversial serta tidak efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Kritik juga ditujukan kepada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dinilai hanya fokus pada pembangunan fisik tanpa memadukan aspek pemberdayaan masyarakat, sehingga mengalami kegagalan dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan.

Meskipun, Program Keluarga Harapan (PKH) dianggap sebagai pendekatan pemberdayaan yang lebih sukses, PKH memberikan akses kepada masyarakat yang rentan dengan tujuan jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup. Keberhasilan program ini dapat dilihat dari pemberian beasiswa kepada anak-anak, memberi mereka peluang untuk menciptakan dampak yang signifikan di masa depan. Pemerintah perlu memberikan lebih banyak perhatian pada pengembangan program pengentasan kemiskinan untuk memastikan bahwa program tersebut memenuhi kebutuhan dan memperkuat masyarakat.

Evaluasi mendalam sangat diperlukan agar program yang lebih produktif dapat terus berlanjut, termasuk perbaikan dalam penargetan dan kegiatan produktif untuk meningkatkan kondisi penerima manfaat program. Dengan pendekatan ini, program pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat memberikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan.

Teori Konsep

Teori konseptual yang diterapkan oleh peneliti adalah teori modal sosial. Menurut definisi Putnam (1993), modal sosial merupakan dasar kehidupan sosial, jaringan, norma, dan keyakinan yang memudahkan partisipasi dalam kerjasama yang lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama. Haryant (2011) menekankan modal sosial sebagai seperangkat nilai dan norma bersama di antara anggota kelompok yang memfasilitasi kerja sama di antara mereka.

Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), modal sosial ini berperan sebagai sistem untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di tingkat RT, RW, dan kelurahan setempat. Mereka membentuk jaringan atau koneksi untuk berkomunikasi tentang Bantuan PKH yang diterima. Bantuan PKH kemudian disalurkan kepada masing-masing KPM dengan tujuan meminimalkan anggota yang tidak memiliki informasi terkini. Seperti dikatakan oleh Pak Akbar selaku fasilitator PKH Kelurahan Ciputat Timur,

“anggota-anggota PKH tuh solid loh, kalo ada bantuan cair mereka langsung menghubungi anggota lain agar segera mengambil bagiannya”.

Biasanya fasilitator PKH akan menunjuk salah satu warga yang sekiranya paling paham dengan teknologi dan mampu merangkul KPM lainnya untuk menjadi ketua yang bertugas memonitor KPM lain (yang kurang informasi) memastikan bahwa bantuan telah didapatkan oleh KPM tersebut.

Program PKH: Perlindungan Kepada Masyarakat Miskin dan Efek Pengentasan Kemiskinan

Sejak tahun 2007, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai langkah untuk melindungi masyarakat miskin dan mengatasi permasalahan kemiskinan. PKH membedakan diri dari bantuan langsung tunai (BLT) karena tidak hanya memberikan bantuan tunai dalam situasi krisis, tetapi juga menitikberatkan pada pembangunan sistem perlindungan sosial jangka panjang. Program ini terinspirasi oleh kesuksesan program serupa di negara-negara lain yang dikenal dengan istilah *conditional cash transfer* (CCT).

PKH memiliki tujuan jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan, dan meskipun tidak dapat mencapai tujuan tersebut secara independen, diharapkan program ini dapat berperan sebagai bagian dari solusi. PKH ditujukan untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan menetapkan persyaratan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pendidikan dan kesehatan. Melalui pemberian bantuan tunai, PKH bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan sosial, mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, serta memutus siklus kemiskinan. Sejak tahun 2012, PKH fokus pada memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai salah satu sektor yang berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 2016, kelompok sasaran peserta PKH diubah menjadi "Keluarga Miskin" (KM) untuk memastikan distribusi bantuan yang merata, sebagai bagian dari program pemindahan *Al Bergeld* (CCT).

Meskipun Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan yang mulia, implementasinya beberapa kali mendapat kritik. Beberapa kritikan tersebut menyatakan bahwa program ini mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan riil masyarakat miskin, karena analisis permasalahan yang dilakukan cenderung tidak membahas permasalahan individual secara mendalam. Selain itu, PKH juga dianggap bersifat *top-down* dan tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat, tidak mempertimbangkan kapasitas masyarakat.

Sebagai alternatif, pendekatan pemberdayaan masyarakat dianggap lebih cocok untuk pengentasan kemiskinan. Partisipasi aktif masyarakat dianggap dapat meningkatkan efektivitas program, dan mengukur perubahan perilaku dianggap sebagai indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan program pengentasan kemiskinan. Program tersebut tidak hanya diharapkan memberikan perlindungan sosial, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara keseluruhan untuk mewujudkan perubahan yang berkelanjutan.

Sejak merdeka, Indonesia telah berfokus pada pembangunan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Tahun 1945 (Mawardi, 2013). Dalam upaya pembangunan saat ini, pemerintah terus berusaha mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Meskipun tantangan kekurangan kesejahteraan masyarakat masih ada, Program Keluarga Harapan (PKH) tetap berfokus pada rumah tangga miskin ekstrem dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Melalui pemberian bantuan tunai, PKH bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pelayanan sosial, serta mengurangi beban pengeluaran

keluarga miskin guna memutus siklus kemiskinan. Sejak tahun 2012, PKH berfokus pada memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 2016, kelompok sasaran peserta PKH diubah menjadi "Keluarga Miskin" dengan tujuan untuk memastikan adanya pemerataan bantuan.

Kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan dalam banyak kasus (Chriswardani, 2005, hlm. 122). Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang kekurangan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan air minum, yang erat kaitannya dengan kualitas hidup. Selain pendapatan, kinerja juga menjadi faktor penting dalam situasi sosial seseorang, termasuk tingkat pendidikan, usia, dan disabilitas.

Sebagai contoh, Kabupaten Bone dihadapkan pada masalah kemiskinan yang serius (Arifin, 2020; Murdiansyah, 2014). Tingkat kemiskinan yang tinggi berdampak serius pada kehidupan masyarakat. Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, masalah ekonomi, pengangguran, serta keterbatasan fisik dan mental masyarakat menjadi hambatan utama untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah tersebut (Maulani et al., 2020).

Pemerintah Kabupaten Bourne merespons masalah ini dengan mengenalkan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB), yang juga dikenal sebagai *conditional cash transfer* (CCT). Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang kurang mampu. Program ini telah diimplementasikan sejak tahun 2007 dan terbukti berhasil dalam mengatasi kemiskinan, khususnya kemiskinan kronis (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2015). Pelaksanaan PKH diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat. Mulyadi (2018) menegaskan pentingnya implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. PKH dianggap sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengurangi beban kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Pelayanan Kemanusiaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur."

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penggunaan pendekatan ini memiliki tujuan yang rasional untuk memastikan bahwa fokus penelitian sesuai dengan realitas di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelidiki atau menjelaskan keadaan sosial yang diteliti secara menyeluruh, komprehensif, dan mendalam. Dasar dari pendekatan ini adalah keyakinan bahwa pengetahuan dapat dihasilkan dari lingkungan sosial, dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial merupakan suatu proses ilmiah yang valid, dengan tujuan memberikan informasi yang beralasan.

Bogdan dan Taylor, seperti yang dikutip oleh Moleong (2007: 3), menyatakan bahwa metodologi kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, yang melibatkan aspek perilaku yang diamati dalam masyarakat. Fokus pertanyaan penelitian ini berpusat pada upaya

meningkatkan implementasi kebijakan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan, dengan mempertimbangkan empat unsur yang dianggap kriteria penting dalam implementasi kebijakan, sebagaimana ditekankan oleh Edwards III, seperti yang diungkapkan dalam Winarno (2012), yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada evaluasi status pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur. Dalam penilaian ini, sejumlah metrik diaplikasikan, yakni:

1. Komunikasi memiliki peran krusial dalam proses politik dengan membantu pelaksana kebijakan memahami secara tepat tindakan yang mereka lakukan. Sebelum implementasi, kebijakan dan prosedur implementasi harus diinformasikan secara jelas kepada personel yang relevan.
2. Sumber daya manusia merupakan unsur kunci yang mencakup staf dan pejabat yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas mereka. Efektivitas kewenangan mereka dan penyediaan pelayanan publik yang tepat dan efektif, termasuk pemenuhan peralatan yang diperlukan, juga berperan penting.
3. Faktor alam berkaitan dengan sikap dan karakter para pelaksana, termasuk komitmen, integritas, sifat demokratis, dan tantangan dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran serta menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi.
4. Birokrasi memiliki peran krusial dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Ini mencakup sejauh mana pengendalian antara manajer dan bawahan dalam struktur organisasi serta apakah terdapat standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap pelaksana dalam menjalankan kebijakan.

Dalam penelitian ini langkah awal metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi. Observasi dapat diartikan sebagai tindakan memusatkan perhatian seseorang pada keadaan suatu objek atau situasi. Observasi dengan demikian membantu untuk menyelidiki secara langsung kondisi lingkungan objek penelitian, mengumpulkan data, dan memperoleh gambaran utuh mengenai objek tersebut. Proses observasi dalam penelitian ini dilakukan melalui kunjungan langsung ke kelurahan Cempaka Putih.

Langkah kedua dari metode pengumpulan data yang diterapkan oleh penulis adalah wawancara. Wawancara dapat didefinisikan sebagai percakapan dengan tujuan tertentu antara dua pihak, yaitu pewawancara sebagai penanya atau penyedia informasi, dan orang yang diwawancarai sebagai penjawab pertanyaan. Wawancara dilaksanakan secara langsung atau tatap muka dengan para informan. Untuk mendukung pengumpulan data, penulis menggunakan alat-alat tulis dan kamera untuk merekam gambar dari lokasi setempat.

Langkah ketiga dalam teknik pengumpulan data yang diterapkan oleh penulis adalah dokumentasi dan pencatatan. Dokumentasi merujuk pada kumpulan data yang diperoleh dari dokumen dan pustaka yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Ini merupakan suatu teknik pencatatan data sekunder yang mengandalkan arsip atau dokumen. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan data dokumen yang relevan dengan fokus penelitian penulis. Data yang terdapat dalam dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi informasi yang terjadi pada masa lalu atau peristiwa tertentu.

Para informan yang terlibat dalam penelitian ini merupakan individu yang memiliki kemampuan memberikan informasi mendalam mengenai situasi atau keadaan tertentu, memiliki pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti, dan dianggap dapat dipercaya sebagai sumber data. Informan penelitian mencakup 4.444 mediator PKH dan pekerja sosial di organisasi lokal.

Kesimpulan dari pengumpulan data untuk pengujian dimulai dari tahap awal pengumpulan data. Seorang peneliti kualitatif memulai dengan menentukan "makna" dari suatu fenomena dengan mempertimbangkan keteraturan, pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, hubungan sebab-akibat, dan proporsi. Seorang peneliti yang kompeten akan mampu merespons kesimpulan ini secara jelas dan menjaga integritas selama proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam program ini, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan bantuan keuangan secara berkala yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti biaya pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan gizi. PKH juga mendorong partisipasi keluarga dalam program pendidikan dan kesehatan, seperti imunisasi anak, kunjungan Posyandu, dan pola makan sehat. Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki dampak positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan akses keluarga terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Program ini memberikan harapan kepada keluarga miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan menciptakan peluang yang lebih baik bagi generasi berikutnya.

Melalui PKH, pemerintah Indonesia berusaha membangun landasan yang lebih kokoh bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi negara. Menurut informasi dari nara sumber, Bapak Akbar, seorang pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial Kelurahan Cempaka Putih, PKH tidak hanya diterapkan di tingkat kelurahan atau kecamatan saja, melainkan di seluruh Indonesia. Program Keluarga Harapan di Deputy Kecamatan Chempaka Putih dijalankan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial sebagai fasilitator bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Besaran bantuan PKH yang diterima oleh warga bergantung pada kebutuhan spesifik dari setiap keluarga. Ini mencakup dukungan sekolah, dukungan untuk anak kecil, dukungan untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dan dukungan untuk lansia. Meskipun mungkin berbeda, bentuk dukungan yang diberikan tetap berupa uang tunai atau sejenisnya.

Karena keluarga penerima manfaat (KPM) ditetapkan berdasarkan informasi yang terdapat di Departemen Pelayanan Sosial (Dinsos), yang kemudian disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pihak camat tidak memiliki informasi mengenai siapa yang bertanggung jawab atas KPM PKH. Camat menyatakan bahwa dia tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan terkait hal ini. Saat warga mengajukan permohonan menjadi KPM, langkah-langkah tertentu harus diikuti. Pertama, warga harus meminta RT/RW untuk menyusun surat pengantar untuk menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu Bekerja (SKTM), karena camat tidak memiliki pengetahuan langsung mengenai hal ini. Karena SKTM bersifat tergantung pada status penduduk, peran RT/RW adalah menentukan kelayakan penduduk untuk mendapatkan SKTM.

Dalam hal ada warga yang memenuhi syarat, camat akan menyusun SKTM dan mengirimkannya ke dinas sosial. Setiap rumah bantuan PKH sebanyak 4.444 biasanya sudah mendapatkan cap, yang berisi informasi bantuan dalam format seperti BPJS, KIS, dan KIP.

PKH merupakan program yang tidak dapat diwariskan, misalnya, jika kepala rumah tangga yang memiliki anak dan istri meninggal, bantuan terputus meskipun keluarga tersebut masih berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh pemberian penerima PKH hanya satu Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sekretaris camat menyatakan bahwa tidak ada hambatan dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Cempaka Putih. Namun, dalam beberapa kasus, warga sering mengeluh bahwa mereka tidak menerima bantuan lebih lanjut ketika bantuan dari pihak pembantu sudah terlambat, sehingga camat tidak mengetahui secara pasti mengenai hal tersebut. Layanan penyaluran bantuan PKH dipantau untuk setiap KPM. Kadang-kadang, terdapat masalah karena DTKS kehilangan data KPM dan KPM tidak lagi didukung. Beberapa warga juga sering merasa iri karena kurangnya dukungan yang mereka terima dan mengajukan pengaduan ke kantor kabupaten untuk mendapatkan bantuan, meskipun kewenangan tersebut tidak ada di tingkat kecamatan.

Proses pengawasan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya dilakukan oleh pengurus kecamatan, tetapi juga melibatkan pembentukan kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di tingkat kecamatan. Dalam kelompok ini, salah satu warga penerima manfaat dipilih sebagai ketua kelompok dengan peran memastikan bahwa seluruh KPM telah mendapatkan bantuan. Menurut Akbar, ketua kelompok tersebut dianggap kuat, dan

"anggota PKH yang kuat akan segera menghubungi anggota lain saat ada bantuan cair".

Hal ini terkait dengan konsep modal sosial yang menggambarkan landasan kehidupan sosial, jaringan, norma, dan keyakinan yang memfasilitasi partisipasi dalam kerjasama yang lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama.

Pelayanan PKH di Kecamatan Cempaka Putih dianggap sangat efektif untuk meningkatkan kesejahteraan KPM. Masyarakat yang awalnya tidak memiliki apa-apa mengalami peningkatan menjadi nol, dan anak-anak yang sebelumnya putus sekolah kini mendapatkan bantuan bulanan. Untuk memastikan bahwa PKH tidak salah sasaran, tim pemantauan PKH Kementerian Sosial turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan verifikasi data, termasuk kondisi perumahan, situasi perekonomian, kesehatan, dan status anak-anak yang bersekolah atau tidak. Saat ini, jumlah penerima bantuan PKH di Kecamatan Cempaka Putih mencapai 186 orang yang tersebar dalam 186 Kartu Keluarga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kesimpulan disebutkan secara jelas hasil penelitian Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program Pemerintah Indonesia sejak 2007 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang tergolong miskin, program ini berupa pemberian bantuan sosial kepada KPM berupa uang tunai maupun sembako. Di Kelurahan Ciputat Timur sendiri sampai saat ini tercatat KPM PKH berjumlah 186 Kartu Keluarga. Dalam pemantauan penyaluran bantuan, setiap RT/RW membentuk kelompok yang akan dipilih ketua dari masing-masing kelompok tersebut. Adanya pembentukan kelompok tersebut termasuk dari salah satu teori modal sosial dimana masyarakat yang memiliki tujuan yang sama saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut, pada kasus kelompok PKH ini, ketua kelompok maupun

anggota kelompok saling mengingatkan teman sesama kelompok bila bantuan PKH telah cair. Menurut penuturan Pak Akbar sebagai pendamping PKH Kelurahan Ciputat Timur, kelompok PKH sangat solid yang berakibat minimnya perselisihan diantara anggota kelompok tersebut. Untuk jumlah penerima PKH di Kelurahan Ciputat Timur saat ini berjumlah 186 Kartu Keluarga.

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap tulisannya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang "Implementasi Pelayanan Kemanusiaan Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur". Penulis sadar bahwa penelitian yang di tulis ini masih jauh dari kata sempurna karena sesungguhnya kesempurnaan sendiri adalah milik Allah SWT. Penulis berharap para pembaca bisa memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap penelitian yang ditulis agar penulis dapat mengetahui di mana letak kesalahannya dan bisa dijadikan pelajaran di kesempatan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Nur. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Chriswardani, S. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(03), 121–129.
- Devina, A. (2023). Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Pisangan di Kecamatan Ciputat Timur.
- Manongga, A. (2018). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI KELURAHAN PINOKALAN KOTA BITUNG. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, No. 1, Tahun 2018, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi, 1, 1–10.
- Mawardi, I. (2013). Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1980-2010. UPN" Veteran" Yogyakarta.
- Mulyadi, D. (2018). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik. Alfabeta CV.
- Nurmawardah, F. (n.d.). Analisis Modal Sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Cimanggis Kecamatan Bojong Gede.
- Kemensos RI. (2015). Pedoman Umum Program Keluarga Harapan.

